

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN DI KECAMATAN TIDORE TAHUN 2015

*Adi Abdul Kadir¹
Michael Mamentu²
Trintje Lambey³*

Abstrak

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu wujud demokratis lokal. Dimana dengan adanya pemilihan kepala daerah ini masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin di daerahnya. Selain itu pemilihan kepala daerah secara langsung membuat rakyat lebih bisa memantau dan meminta pertanggung jawaban sehingga akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat lebih meningkat. Karena rakyat memiliki hak untuk menagih janji dan meminta pertanggung jawaban dari kepala daerah. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya merupakan partisipasi politik dalam rangka meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Tidore. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tidore dalam pemilihan kepala daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 cukup tinggi. Hal ini dilihat dari kehadiran masyarakat dalam pemberian suara sebanyak 11.252 orang dari 12.827 orang yang terdaftar dalam DPT dengan pencapaian partisipasi sebesar 89.00%. Pasangan nomor urut 1 Drs. Hamid Muhammad dan Abdurrahim Saraha, SH, memperoleh suarasebanyak (27.90%), pasangan nomor urut 2 Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM. dan Mochtar Sangadji, SIP. Dan nomor urut 10% 3 Capt. H. Ali Ibrahim, MH. dan Muhammad Senin, SE. memperoleh suara sebanyak (62.10%). Partisipasi politik masyarakat tidak hanya memberikan suara dalam Pemilu. Masyarakat Kecamatan Tidore juga ikut berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum seperti kampanye atas keinginan diri sendiri maupun diajak oleh orang terdekat. Masyarakat juga berpartisipasi menjadi anggota partai baik sebagai anggota/kader partai maupun sebagai simpatisan partai.

Kata Kunci: Partisipasi, Kinerja.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pemilihan langsung kepala daerah ini awalnya diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun dalam penerapannya terjadi perubahan pada PP ini, yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 17 Tahun 2005. Perubahan dalam PP yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah ini terus terjadi penyempurnaan demi terselenggaranya demokratisasi lokal yang efektif. Sehingga lahirlah PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi yakni pemilihan umum, pemerintah telah membentuk lembaga khusus yang menangani pelaksanaan pemilihan umum baik administratif maupun teknis. Lembaga pemerintah tersebut adalah KPU yaitu komisi pemilihan umum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan umum baik di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, atas usul inisiatif DPR bersama pemerintah menyusun dan menyetujui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, dimana didalamnya mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 ini kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Politik dan demokrasi memiliki kaitan yang erat dengan partisipasi. Dimana partisipasi politik adalah salah

satu aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi. Keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Samuel Huntington dalam Rahman (2007:285) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang/kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam bentuk penggunaan hak suaranya dalam pemilihan umum maupun partisipasi masyarakat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sikap antusias masyarakat dalam kegiatan partisipasi politik membawa konsekuensi pada tatanan politik yang stabil. Akan tetapi sikap dan perilaku masyarakat dalam partisipasi politik kadangkala mengarah pada sikap arogan, apatis dan sinisme, sehingga hal tersebut mempengaruhi tingkat partisipasi mereka saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Yang pada akhirnya membuat mereka enggan untuk turut memberikan suara dalam pemilihan dan juga tidak ikut menghadiri kegiatan politik lainnya. Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tidore dalam memberikan hak suara mereka dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tergolong tinggi, jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang tidak mencapai 80%, penyebab tingginya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan bias disebabkan banyak factor, mulai dari kesadaran masyarakat akan pentingnya

memberikan hak suara mereka, sosialisasi yang baik dari KPU serta peran dari partai politik yang berjalan dengan baik dalam mengajak masyarakat untuk memilih. Sebaliknya Menurunnya angka partisipasi politik masyarakat di kecamatan lain dalam menggunakan hak pilih, kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dan rendahnya frekuensi kampanye yang dilakukan oleh para calon Walikota dan Wakil Walikota, juga bisa disebabkan karena faktor apatis masyarakat melihat pemilu seringkali dilakukan, namun perubahan yang dijanjikan oleh para calon tidak kunjung tiba. Kota Tidore Kepulauan merupakan daerah otonom hasil pemekaran wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Pada tanggal 9 Desember 2015 ini Kota Tidore Kepulauan telah menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah secara langsung yang juga merupakan pemilihan kepala daerah yang ketiga kalinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan dari jumlah penduduk 19.256 yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah berjumlah 12.827 pemilih. Diantaranya 6.224 laki-laki dan 6.603 perempuan. Berikut diuraikan lebih rinci rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Tidore.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pemilih tetap untuk Kecamatan Tidore berjumlah 12.827 pemilih.

Dimana yang menggunakan hak suara pada putaran pertama berjumlah 80% atau 11.252 pemilih. Sisanya sebanyak 20% adalah golput atau tidak memberikan suara. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tidore dalam pemilihan langsung kepala daerah tahun 2015 masih tergolong baik dibandingkan dengan kecamatan lainya di Kota Tidore Kepulauan. Pemilihan Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2015 diikuti oleh tiga pasang calon. Berikut nama-nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan berdasarkan nomor urut:

Drs. Hamid Muhammad dan Abdurrahim Saraha, SH

Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM. dan Mochtar Sangadji, SIP.

Capt. H. Ali Ibrahim, MH. dan Muhammad Senin, SE.

Berbagai permasalahan yang mewarnai pelaksanaan pemilihan kepala daerah, mulai dari sikap apatis yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menyebabkan mereka memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya bahkan sampai pada aksi anarkis yang terjadi di berbagai daerah terkait pemilihan kepala daerah merupakan dampak dari kurangnya kesadaran politik dari masyarakat dalam berdemokrasi. Hal ini semakin diperparah dengan adanya indikasi money politic. Tingkat pendidikan politik masyarakat yang masih rendah serta tingkat kesejahteraan yang juga belum maksimal menyebabkan oknum-oknum tertentu mudah untuk mempengaruhi masyarakat di kalangan bawah untuk memilih salah satu calon.

Kajian Pustaka

Ndraha (2013:102) menyatakan bahwa “partisipasi adalah kesediaan

masyarakat untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri". Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan individu maupun sekelompok orang secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Istilah partisipasi sering digunakan untuk memberi kesan mengambil bagian dalam sebuah aktivitas. Mengambil bagian dalam sebuah aktivitas mengandung arti ikut serta tanpa ikut menentukan bagaimana pelaksanaan aktivitas tersebut tetapi dapat juga berarti ikut serta dalam menentukan jalannya aktivitas tersebut, dalam artian ikut menentukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut. Partisipasi memberikan suatu tujuan yang ingin kita capai menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam berpartisipasi, seseorang akan berfikir tentang apa yang harus diberikan kepada orang lain atau kepada kelompok tertentu. Partisipasi tersebut akan menyebabkan timbulnya keinginan seseorang memiliki secara langsung dapat diimplementasikan dalam suatu kegiatan. Dalam penyelenggaraan suatu pembangunan partisipasi politik masyarakat sangat penting terlebih lagi jika masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah di segala bidang. Dibutuhkan adanya usaha yang membuat masyarakat tidak memiliki salah pengertian dengan kebijakan yang pemerintah dan harus didasarkan prinsip saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas

politik. Bentuk partisipasi politik yang paling umum adalah pemungutan suara atau dikenal dengan istilah voting, entah itu untuk memilih calon para wakil rakyat, entah untuk memilih wakil negara. Surbakti (2010:180) mengatakan bahwa "partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya". Karena itu partisipasi politik dapat diwujudkan dengan keikutsertaan rakyat dalam berbagai kegiatan politik, pengertian kegiatan politik tidak hanya tertitik pada fokus memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, tetapi lebih luas berkaitan dengan kesejahteraan dan kebaikan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai warga negara yang taat hukum positif. Teori yang digunakan penulis adalah teori partisipasi politik menurut: Menurut Budiarjo (2012:367) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Menurut Prihatmoko (2005:183) mendefinisikan partisipasi politik sebagai berikut: Partisipasi politik adalah aktivitas yang dengannya individu dapat memainkan peran dalam kehidupan politik masyarakatnya, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk memberi andil dalam menggariskan tujuan-tujuan umum kehidupan masyarakat tersebut, dan dalam menentukan sarana terbaik untuk mewujudkannya. Rush dan Althoff (2007:23) berpendapat bahwa "partisipasi politik ialah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan dalam sistem politik". Dari

beberapa definisi di atas mengenai partisipasi politik maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga berupa kegiatan yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Lebih lanjut Rush dan Althof (2007:165) menyebutkan empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, antara lain: Adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau diskusi informal. Faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-orang yang berwaktas sosial, yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi dan lain-lainnya, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik. Faktor karakteristik sosial seseorang. Karakteristik sosial seseorang menyangkut status ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang.

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini memakai pendekatan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk menemukan apa yang sedang terjadi dan kemudian untuk membuktikan apa yang telah ditemukan.. Dengan cocok kita maknakan kategori-kategori itu harus siap (tidak secara dipaksakan/dibuat-buat) diaplikasikan dan ditunjukkan oleh data di bawah studi; dengan berfungsi (works) kita maknakan bahwa kategori-kategori itu harus sangat relevan dan bisa menjelaskan perilaku

di bawah studi. Penemuan dan verifikasi berarti bahwa kategori-kategori itu bergerak ke belakang dan ke depan antara induksi dan deduksi, antara pengalaman dan refleksi terhadap pengalaman, dan antara tingkat yang lebih besar dan tingkat yang lebih tinggi daripada inkuiri naturalistik (Patton, 2009:47). Meneliti menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran tentang sejauh mana Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan, maka dari itu berdasarkan hasil wawancara maupun data tertulis, diharapkan dapat memberikan pemaparan yang signifikan, lebih baik dan terarah sesuai dengan harapan.

Berdasarkan pengamatan atas hasil survei yang dilakukan oleh peneliti dalam jangka waktu 2 minggu di KPU Kota Tidore Kepulauan maka penulis menetapkan Sekretaris KPU, 2 Anggota KPU, Camat Tidore, dan 7 Masyarakat Kecamatan Tidore yang akan dijadikan sebagai informan untuk melengkapi data mengenai penelitian yang kemudian akan dilakukan.

Hasil Penelitian

Partisipasi masyarakat Kota Tidore Kepulauan khususnya Kecamatan Tidore dalam pemilihan Kepala daerah merupakan suatu tahapan yang perlu mendapatkan perhatian dan apresiasi yang telah mencapai angka partisipasi 89.00% melebihi target yang ditetapkan oleh KPU Daerah Kota Tidore Kepulauan yaitu 80%. Selain sebagai pemenuhan target partisipasi juga dapat dimaknai sebagai keberhasilan institusi dan lembaga proses demokrasi dalam meningkatkan kesadaran berdemokrasi. Bagi pihak penyelenggara tingginya partisipasi politik masyarakat dalam hal pemberian suara sudah menunjukkan

kesadaran masyarakat itu sendiri dalam berdemokrasi. Akan tetapi tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Kota Tidore Kepulauan pada kenyataannya tidak semata-mata menunjukkan tingkat kesadaran berdemokrasi yang tinggi karena dipengaruhi oleh berbagai fenomena seperti halnya mobilisasi suara. Dimana masyarakat menjadi objek politik praktis, adanya faktor money politik mampu mempengaruhi dan mengerakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Hal ini terbukti dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu masyarakat Kecamatan Tidore yang ditetapkan sebagai informan Fahmi (23 Tahun) Mengatakan: “dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 saya ikut mencoblos, saya memilih hanya ikut-ikutan saudara saja, apa yang menjadi pilihannya yah saya ikut saja. Sebenarnya saya malas datang ke TPS tapi karena sudah dijemput yah saya ikut saja. pada waktu itu saya juga diberikan uang seratus ribu rupiah oleh saudara saya”. Hal itu membuktikan bahwa money politik mampu mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi. Kurangnya pemahaman masyarakat dan rendahnya pendidikan politik masyarakat akan mampu dipengaruhi oleh elit-elit yang ada, dimana pilihan mereka mampu diarahkan dengan berbagai macam pertimbangan yang mengarah kepada pelanggaran dalam proses berdemokrasi.

Panwas Kota Tidore Kepulauan membenarkan adanya tindakan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pilkada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015. Berikut yang

disampaikan oleh Ibu Marsye Idris (42 Tahun) Rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat bisa saja menjadi objek politik praktis, namun kami selaku pengawas juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015. Dalam pelaksanaan pilkada Tahun 2015 ada beberapa pelanggaran yang ditemukan salah satunya di kecamatan Tidore tapi itu sudah diproses pada tingkatan kecamatan karena ada panwas kecamatan”. Ketua Panwas Kecamatan mengatakan: “untuk pelaksanaan pilkada memang ada beberapa laporan yang masuk pada kami panwas kecamatan, dimana selama pelaksanaan pilkada ada percobaan money politik dan pembagian beras dari salah satu pasangan calon, tapi itu hanya sampai pada tahapan pelaporan dimana dalam laporannya masyarakat tidak mau jadi saksi. Bagaimana mau diusut kalau dalam laporannya tidak ada yang mau bertanggung jawab. Itu hanya sampai tahapan laporan karena tidak ada bukti dan tidak ada yang mau jadi saksi”. Ibu Intjes Lolaroh (59 Tahun) mengatakan memang benar adanya pembagian beras pada waktu pelaksanaan pilkada Kota Tidore Kepulauan, namun tidak ada arahan untuk mendukung pasangan calon manapun: “pada waktu pilkada kemarin memang ada pembagian beras, saya juga menerima beras yang dibagikan itu. Tapi tidak darahkan untuk memilih salah satu pasangan calon. Katanya itu sumbangan. Saya juga menerima uang pada waktu pilkada kemarin.” Dalam Kegiatan Pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung baik itu dalam pemilihan kepala daerah maupun presiden, dalam pelaksanaannya pasti terjadi pelanggaran didalamnya, karena dalam

ajang seperti ini masyarakat merupakan objek dari kegiatan tersebut sehingga berbagai jenis pelanggaran terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tingginya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Tidore disebabkan berbagai pertimbangan seperti halnya mobilisasi suara. Mobilisasi suara terjadi dalam bentuk pemberian uang serta pembagian beras kepada masyarakat yang ada. Dari pihak pengawas pemilihan umum Kota Tidore Kepulauan mengatakan tindakan tersebut hanya sampai pada tahapan pelaporan dan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak saksi dan bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015. Berdasarkan hasil wawancara ketua panwas Kecamatan Tidore mengatakan masyarakat enggan dan takut untuk memberikan kesaksian terkait dengan pelanggaran yang ada. Untuk dapat memproses tindakan pelanggaran paling kurang harus memenuhi beberapa unsur yang mendukung adanya tindakan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015.

Dalam negara besar sekalipun kegiatan money politik tidak bisa dihilangkan, namun bagaimana kita menyikapi money politik itu sendiri. Biasanya pendidikan politik masyarakat yang tinggi dalam menanggapi permasalahan money politik ini akan ditanggapi dengan kepala dingin dalam artian masyarakat tidak akan mudah terpengaruh oleh uang terhadap apa yang sudah menjadi pilihannya. Berbeda dengan masyarakat dengan pendidikan politik yang rendah, mereka lebih cenderung mengikuti keinginan dari yang memberikan uang itu, sehingga hal itulah yang akan mengubah pilihannya apalagi jika

masyarakat itu bingung dalam menentukan pilihan sehingga dengan money politik inilah terbentuk pilihan masyarakat oleh masyarakat yang berpendidikan politik rendah dan menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Selain itu janji-janji para calon pada saat kampanye terkadang tidak terealisasi pada waktu mereka memimpin merupakan salah satu alasan masyarakat menerima kehadiran money politik. Kenyataan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pendidikan politik itu sendiri, padahal masyarakat sangat berperan penting dalam kegiatan politik. Fakta lainnya yang dapat di gali dari lapangan adalah bahwa masih adanya pemilih yang sekedar memilih atau asal ikut tanpa dibekali dengan kesadaran dan pemahaman yang cukup. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu Intjes :“kalau dilihat untuk partisipasi masyarakat dalam pemberian suara sebagian besar berdasarkan keinginan dari diri sendiri, tapi tidak dapat di pungkiri juga bahwa masih adanya masyarakat yang hanya asal ikut atau ikut-ikutan saja. seperti halnya mereka ikut memilih karena ada hubungan keluarga, ikut suami, ikut saudara atau kerabat terdekat, atau ikut partai”. Hal itu terbukti dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu masyarakat Ibu Meiny Mengatakan: “saya memilih pada waktu pilkada Kota Tidore hanya ikut-ikutan saja ikut suami dan anak saya. saya juga tidak tahu visi dan misi dari calon yang saya pilih hal ini karena saya hanya mendengar dari suami dan anak saya untuk mengikuti pilihan mereka”. Berdasarkan hasil penelitian setelah melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat dan informan lainnya, menunjukkan bahwa benar masih adanya masyarakat yang hanya ikut-ikutan saja, seperti ikut pilihan saudara, suami, dan

orang terdekat lainnya. Pilihan yang didasari dari ikut pilihan saudara, kerabat, atau orang terdekat merupakan salah satu budaya yang juga sering kali terjadi pada masyarakat Kecamatan Tidore. Masyarakat menganggap bahwa siapapun yang nantinya terpilih tidak akan berpengaruh pada kehidupan pribadi mereka dan yang tahu kehidupan mereka hanya orang terdekat mereka saja, masyarakat juga beranggapan bahwa ketika nanti mereka mendapat suatu musibah atau masalah hanya orang terdekat saja yang bisa secara langsung melihat keadaan mereka dan membantu mereka. Adanya hubungan kekeluargaan yang erat seringkali menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Pemilih yang cerdas cenderung lebih aktif mengamati kegiatan pemilihan umum kepala daerah langsung, mulai dari mengetahui Visi dan Misi, mencari tahu gaya kepemimpinan serta melihat track recordnya. Seperti yang disampaikan oleh bapak Buan: “dalam pilkada tidore kepulauan tahun 2015 saya ikut memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan, saya memilih atas dasar keinginan sendiri dan melihat kualitas juga Visi dan Misi dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan agar dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas”. Hal yang sama juga dikatakan Rodius: “Saya ikut memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan, saya memilih berdasarkan keinginan saya dan hati nurani saya. saya merupakan tim sukses salah satu pasangan calon jadi sudah pasti saya tahu visi dan misi calon yang saya pilih pada waktu itu. Saya memilih bukan melihat partainya tapi figur dari

calon itu sendiri serta visi dan misi pasangan calon itu”. Ibu Miske juga mengatakan: “saya ikut mencoblos, saya memilih berdasarkan keinginan diri sendiri. ikut memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan berarti kita peduli dengan daerah kita karena pilihan kita hari ini menentukan masa depan kota tidore 5 tahun kedepan. Yang terpenting itu kita harus tahu visi dan misi calon yang dipilih, selain itu saya juga melihat figur dari pasangan calon yang ada”. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat itu sendiri yang memilih atas dasar keinginan dan dorongan diri sendiri dengan melihat visi dan misi serta kemampuan dari calon yang mereka pilih itu sendiri. Ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Adanya Partisipasi masyarakat Kecamatan Tidore dalam Pemberian Suara sejalan dengan teori dari Miriam Budiardjo (Anwar Arifin 2015 : 78) tentang partisipasi politik yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara yang secara langsung mempengaruhi kebijakan public (Public Policy). Dimana masyarakat Kota Tidore Kepulauan didalamnya masyarakat Kecamatan Tidore ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 dengan cara datang ke TPS dan memberikan suara dalam pelaksanaan pilkada Tahun 2015.

Selain mengikuti pemilihan umum, menghadiri rapat umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Kegiatan rapat umum dalam pelaksanaan pilkada biasanya

digelar dalam bentuk kampanye dilapangan terbuka. Kegiatan ini diharapkan dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat umum pada pemilu pada Tahun 2015 bisa dikatakan sangat antusias. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPC partai Golkar yang juga merupakan koordinator kampanye dari pasangan yang diusung partai Golkar: “kalau bicara soal rapat umum berarti kita bicara soal partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kampanye. Dari yang saya lihat karena saya terlibat langsung dalam kampanye masyarakat sangat antusias dalam menghadiri kampanye, sebagian besar ikut agar dapat mengetahui visi dan misi dari pasangan calon, tapi ada juga yang hanya ikut-ikutan meremehkan saja” (wawancara di kantor DPC partai Golkar Kota Tidore Kepulauan). Hal serupa juga dikatakan oleh ketua sekretariat DPC partai PDI-P bapak Yonly R. Ambat: “antusias dan keinginan masyarakat dalam menghadiri rapat umum yaitu kampanye bisa dikatakan cukup tinggi, dilihat pada waktu pelaksanaan kampanye dan kehadiran masyarakat dalam kampanye, yang tentunya ingin mengetahui visi dan misi dari pasangan calon yang mereka dukung” (di Kantor DPC PDI-P Kota Tidore Kepulauan). Dalam pelaksanaan pemilihan umum kegiatan rapat umum yang paling banyak dihadiri oleh masyarakat adalah kegiatan kampanye. Sebagian besar masyarakat ikut ambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan kampanye. Kehadiran masyarakat merupakan wujud dukungan masyarakat kepada pasangan calon yang mereka dukung. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Buan: “iya, saya mengikuti kampanye untuk mendukung pasangan calon yang

saya pilih bersama dengan teman-teman saya lainnya.” Hal serupa juga disampaikan Bapak Rodius: “Ya, saya ikut kampanye yang digelar pada pilkada 2015 sebagai wujud dukungan saya kepada pasangan calon yang saya pilih”. Ibu Miske juga menyampaikan: “sebagai wujud dukungan kepada pasangan calon yang ada, tentu saja saya ikut ambil bagian dalam kegiatan kampanye.” Dari pernyataan informan tadi, menunjukan bahwa benar adanya partisipasi politik masyarakat dalam menghadiri rapat umum. Melalui rapat umum yang digelar dalam bentuk kampanye dilapangan terbuka, masyarakat dapat melihat dan mendengar secara langsung Visi dan Misi dari pasangan calon yang ada. Ketua Panwas Kecamatan Tidore juga menyampaikan adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kampanye. Berikut kutipan wawancara dengan Ketua Panwas Kecamatan Tidore: “dalam pelaksanaan pilkada kota tidore Tahun 2015 masyarakat kecamatan Tidore juga mengikuti kegiatan kampanye. Kampanye di ikuti oleh anak-anak sampai orang dewasa yang memiliki hak pilih. Melalui kampanye masyarakat dapat mendengar visi dan misi dari setiap pasangan calon yang ada”.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tidore dalam pemilihan kepala daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 cukup tinggi. hal ini dilihat dari kehadiran masyarakat dalam pemberian suara sebanyak 11.252 orang dari 12.827 orang yang terdaftar dalam DPT dengan pencapaian partisipasi sebesar 89.00%. Pasangan nomor urut 1 Drs. Hamid Muhammad dan

Abdurrahim Saraha, SH, memperoleh suarasebanyak (27.90%), pasangan nomor urut 2 Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM. dan Mochtar Sangadji, SIP. Dan nomor urut 10% 3 Capt. H. Ali Ibrahim, MH. dan Muhammad Senin, SE. memperoleh suara sebanyak (62.10%).

Partisipasi politik masyarakat tidak hanya memberikan suara dalam Pemilu. Masyarakat Kecamatan Tidore juga ikut berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum seperti kampanye atas keinginan diri sendiri maupun diajak oleh orang terdekat. Masyarakat juga berpartisipasi menjadi anggota partai baik sebagai anggota/kader partai maupun sebagai simpatisan partai.

Tingginya partisipasi politik masyarakat tidak semata-mata menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi karena masih adanya masyarakat yang hanya sekedar asal ikut, seperti halnya ikut pilihan saudara, kerabat atau orang terdekat. Partisipasi politik masyarakat juga masih ada yang bersifat dimobilisasi dengan adanya praktik money politik.

Saran

Pemilihan Kepala Daerah sebagai ajang untuk memilih pemimpin di masyarakat sebaiknya dimanfaatkan sebagai jalan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemerintahan sebagai wujud demokrasi. Dengan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara diharapkan masyarakat akan selalu terpenggil untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Untuk Penyelenggara pemilihan kepala daerah baik dari KPU Daerah Kota Tidore Kepulauan, Panwas Kota Tidore Kepulauan, Panwas Kecamatan,

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) agar lebih mensosialisasikan pentingnya pendidikan pemilih secara periodik.

Untuk partai politik agar lebih aktif mengadakan pendidikan politik secara langsung dengan masyarakat sehingga dapat mendengar aspirasi mereka, dan juga visi, misi, dan program dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Althof, Philip dan Rush, Michael. 2007. Sosialisasi Kebudayaan dan Partisipasi Politik. Dalam Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada Press.
- Cangara Hafied. 2011. Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, Aman. Analisis Kinerja, Surabaya: Diklat Prop. Dati I Jatim. 1999.
- Glaser B.G. & Strauss A.L. 2006. The Discovery of Grounded Theory. New Brunswick. Aldine Transaction.
- Gunawan, Heri. Pendidikan Karakter Konsep dan Efektifitas, Bandung : Alfabeta. 2014.
- Patton Michael Quinn. 2009. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Miles dan Huberman. Alih Bahasa oleh Rohidi dan Tjetje. Analisis data Kualitatif. Jakarta: UI-Press. 1984.
- Mas'ood Mochtar. 2001. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada Press.
- Moekijat, Drs. Manajemen Kepegawaian. Bandung: Alumni. 1974.

- Moleong. Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remadja Karya.
- Sentono, Prawiro dan Suriyadi. Kebijakan Kinerja Pegawai. Yogyakarta : BPTK. 1997.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Kanisius, 2009.
- Silalahi. Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung. Refika Aditama.
- Budiani, Ni Wayan. 2009. Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Input, vol. 2 (1) : 49-57
- Masruri. 2014. Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010). Governance and Public Policy, vol. 1 (1): 53-76